

Hari/Tanggal : Rabu 29 Juni 2022

Waktu : Pukul 13.30-15-00 WITA

Tempat : Ruang Rapat Departemen Ilmu  
Sejarah

**PERKEMBANGAN BANTAENG PADA MASA KOLONIAL BELANDA,  
1905-1942**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Sarjana  
Pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya**

**Universitas Hasanuddin.**

**RUSTAN**

**Nomor Pokok: F061171302**

**DEPARTEMEN ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TAHUN 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**


**PERKEMBANGAN BANTAENG PADA MASA KOLONIAL BELANDA**

Disusun dan diajukan oleh:

**RUSTAN**  
**F061171302**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 29 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**Menyetujui,**  
**Komisi Pembimbing**  
**Konsultan I** **Konsultan II**

  
**Dr. Nahdia Nur, M.Hum**  
**NIP. 19650321 199803 2 001**

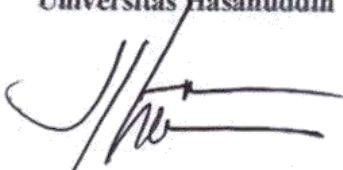
  
**Dr. Muslimin A. R. Effendy, M.A.**  
**NIP. 196708171992031001**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya**  
**Universitas Hasanuddin**

  
**Prof. Dr. Akin Duli, M.A.**  
**NIP. 19640716 199103 1 010**

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah**  
**Universitas Hasanuddin**

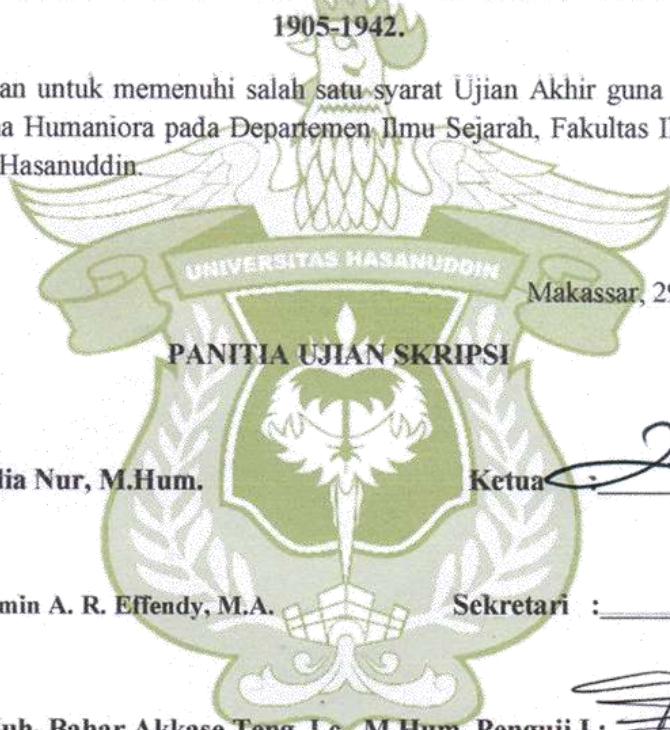
  
**Dr. Iham, S.S., M.Hum.**  
**NIP. 19760827 200801 1 001**

**HALAMAN PENERIMAAN**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Rabu, 29 Juni 2022, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**PERKEMBANGAN BANTAENG PADA MASA KOLONIAL BELANDA,  
1905-1942.**

yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.



Makassar, 29 Juni 2022

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

1. Dr. Nahdia Nur, M.Hum.

Ketua

2. Dr. Muslimin A. R. Effendy, M.A.

Sekretari

:

3. H. Dr. Muh. Bahar Akkase Teng, Lc., M.Hum

Penguji I

4. Nasihin, M.A.

Penguji II

5. Dr. Nahdia Nur, M.Hum

Konsultan I

6. Dr. Muslimin A. R. Effendy, M.A.

Konsultan I

:

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUSTAN**  
Nim : **F061171302**  
Departemen : **ILMU SEJARAH**

Menyatakan bahwa isi skripsi Rustan adalah hasil penelitian sendiri, jika di kemudian hari ternyata ditemukan plagiarisme, maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku, saya bertanggung jawab secara pribadi dan tidak melibatkan pembimbing dan penguji. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan tanpa paksaan ataupun dari pihak lain.

Makassar, Juni 2022

  
(RUSTAN)

## **ABSTRAK**

**Rustan, Nomor Induk Mahasiswa F061171302, dengan judul “perkembangan Bantaeng pada masa kolonial belanda tahun 1905-1942”, dibawah bimbingan Dr. Nahdiah Nur, M. Hum dan Dr. Muslimin A.R. Effendy, MA.**

Penelitian ini membahas tentang perkembangan kota bantaeng pada masa kolonial Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang infrastruktur dan tata ruang kota kolonial Bantaeng tahun 1905-1942. Tahapan penelitian ini dimulai dari pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi hingga historiografi atau penulisan sejarah.

Perkembangann Bantaeng tahun 1905-1942, tidak lepas dari campur tangan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa ini Hindia Belanda menguasai secara sepenuhnya. Terutama di Bantaeng yang dijadikan wilayah Afdeeling oleh pihak Hindia Belanda sebagai bentuk pemerintahan langsung secara administrasi. Selama Pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Bantaeng berbagai infrastruktur dan tata ruang di kembang oleh Hindia Belanda demi melancarkan kekuasaannya di Bantaeng.  
**Kata Kunci : Infrastuktur, tata ruang, kota kolonial.**

## ABSTRAK

**Rustan, Student Identification Number F061171302, with the title "Development of Bantaeng City during the Dutch Colonial Period 1905-1942", under the guidance of Dr. Nahdiah Nur, M. Hum and Dr. Muslim A.R. Effendy, MA.**

This study discusses the development of bantaeng during the Dutch colonial period. This study aims to explain the infrastructure and spatial planning of the Bantaeng colonial city in 1905-1942. The stages of this research start from source collection, source criticism, interpretation to historiography or historical writing. The development of the city of Bantaeng in 1905-1942, could not be separated from the intervention of the Dutch East Indies government. At this time the Dutch East Indies fully controlled. Especially in Bantaeng which was made the Afdeeling area by the Dutch East Indies as a form of direct administrative government. During the time the Dutch East Indies government was in power in Bantaeng, various infrastructure and spatial plans were developed by the Dutch East Indies in order to launch its power in Bantaeng.

**Keywords :** Infrastructure, spatial planning, colonial city.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis masih diberikan kesempatan, Kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi. Pada proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan sumber, pengolahan data hingga penulisan.

Tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study dan menggapai gelar “**Sarjana**”. Selama sepuluh semester berjuang dari ilmu diruangan kuliah dan Lembaga mahasiswa di ilmu sejarah, banyak membentuk karakter dan kepribadian saya sebagai mahasiswa yang kritis dengan menggunakan bidang keilmuan ilmu sejarah di departemen ilmu sejarah, dan dilembaga Himpunan Departemen Ilmu Sejarah Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin (HUMANIS KMFIB-UH).

Penulis sepenuhnya meyakini bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lepas dari bimbang dan bantuan dari segala pihak peran penting dalam kepenulisan skripsi saya. Terimakasih banyak kepada Bapak, dan mama saya yang telah memberikan dukungan yang tiada henti beserta doa restu kepada penulis. Kepada bapak saya **Suka Dg. Nai**, kepada mama saya **Masa Dg. Dinging**. Selain itu saudara-saudara saya **Mantasia, Baharuddin, Baso, Hamsiah, Zainuddin, Kamaruddin, Muhammad Sultan S. H., dan Putri Ramdani**. Rasa peduli dan

kasih sayang diberikan mereka kepada saya menjadikan sebuah dukungan yang sangat berarti.

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Nahdia Nur, M. Hum.** (Pembimbing I) dan kepada Bapak **Dr. Muslimin A.R. Effendy, MA.** (Pembimbing II) yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu penulis juga menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya. Serta mantan Rektor ibu Prof. Dr. Dwie Aries Tina Palubuhu, M.A, beserta Staf dan jajarannya.
2. Prof. Akin Duli, M. A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Beserta para Wakil Dekan dan para jajarannya.
3. Dr. Ilham, S.S., M. Hum, selaku ketua departemen ilmu sejarah fakultas universitas hasanuddin, sekretaris ilmu sejarah A. Lili Evita, S.S., M. Hum, Ibu Nahdia Nur, M. Hum.selaku dosen penasehat Akademik, serta staf pengantar Bapak Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A., PH.D, Dr. Suriadi Mappangara,M. Hum. Mendiam Ibu Magriet Moka Lappia, S.S., M.S., bapak Dr. Muh. Bahar Akkase, Teng., Lcp., M. Hum, Bapak Dr. Muslimin A.R. Effendy, MA. S.S., M.A, Bapak Abd. Rasyid Rahman, M. Ag, Alm. Prof. Dr. Rasyid Asba, M.A, Bapak Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag, Drs. Dias Pradadimara, M. A., M.S. Bapak Dr. Bambang Sulistyo., M. Hum, Bapak



Nasihin, S.S., M.A. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama kuliah. Ilmu yang bermamfaat bagi penulis maupun bagi orang lain.

4. Ujddi Usman Pati, S. Sos selaku kepala sekretariat Departemen Ilmu Sejarah. Terima kasih banyak membantu penulis dalam administrasi kampus, mulai dari perkuliahan hingga selesainya skripsi.
5. Kepada semua teman-teman Fakultas Pallawa 2017 dan Ilmu Sejarah, Pramoedya 2017, Terima kasih atas kersamaannya.
6. Kemudian teruntuk HUMANIS-KMFIB-UH yang telah menjadi rumah kedua selama saya menjadi mahasiswa, serta seluruh keluarga besar HUMANIS, terima kasih atas kebersamaannya. Banyak ilmu yang penulis dapatkan selama berproses bersama. Kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengembangkan diri dari berbagi pengalaman diluar perkuliahan sangatlah berkesan.
7. Terima kasih kepada senior-senior sejarah yang selama menyalurkan pengalaman dan ilmunya selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Hasanuddin.
8. Terkhusus untuk Tri Ayuni Hamzah, dalam waktu dekat menjadi orang selalu hadir dan mengisi waktuku. Banyak terima kasih atas semua waktu yang diluangkan, semua dukungan, doa, dan dorongan yang diberikan menjadi tambahan semangat dalam menyelesaikan masa studi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Pada penulisan ini masih jauh dari kata

sempurna karena keterbatasan ilmu dari penulis, maka dari itu diperlukan saran dan kritik yang membangun untuk penulis agar menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermamfaat baik penulis sendiri maupun yang membacanya.

Makassar, 6 Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Batasan Masalah .....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
4.1. Tujuan .....	7
4.2. Manfaat .....	7
1.5. Tinjauan Pustaka.....	8
1.6. Metodologi Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA BANTAENG .....	17
2.1. Awal munculnya Bantaeng .....	17
2.2. Bantaeng Pada Masa Kekuasaan VOC dan Hindia Belanda .....	18
2.3. Morfologi Kota Bantaeng Dari Awal Munculnya, Kekuasaan VOC sampai kembalinya Pemerintah Hindia Belanda .....	34
3.1. Morfologi Kota Kolonial Belanda .....	35
3.2. Definisi Bantaeng Sebagai Kota .....	41
BAB III MASA KOLONIAL BELANDA DI BANTAENG, 1905-1942.....	45
3.1. Pemerintahan Hindia Belanda .....	45
3.2. Akhir Pemerintahan Hindia Belanda .....	56

3.3. Perkembangan Kota Kolonial Bantaeng Pada Tahun 1805-1942 .....	58
3.4. Bentuk Wilayah Bantaeng .....	62
BAB IV TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR KOTA KOLONIAL BANTAENG TAHUN 1905-1942 .....	59
4.1. Peta Kolonial Bantaeng .....	60
4.2. Bangunan Bekas Kolonial Belanda .....	63
BAB V KESIMPULAN .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	81

## DAFTAR PETA

PETA 1.....	67
PETA 2.....	68
PETA 3.....	69
PETA 4.....	71
PETA 5.....	71
PETA 6.....	73
PETA 7.....	74
PETA 8.....	75
PETA 9.....	76
PETA 10.....	77

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1a .....	78
GAMBAR 1b .....	79
GAMBAR 1c .....	80
GAMBAR 1d .....	81
GAMBAR 1e .....	81
GAMBAR 1f.....	82
GAMBAR 2 .....	84
GAMBAR 3a .....	86
GAMBAR 3b .....	86
GAMBAR 3c .....	86
GAMBAR 3d .....	86
GAMBAR 4a .....	89
GAMBAR 4b .....	89
GAMBAR 4c .....	89
GAMBAR 4d .....	89
GAMBAR 5a .....	90
GAMBAR 5b .....	90
GAMBAR 5c .....	90

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Fenomena yang ditemukan dalam penulisan sejarah Indonesia baik dalam bentuk artikel ataupun jurnal sampai buku sejarah, lebih banyak bercerita tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajah, biografi, sejarah politik, perdagangan, revolusi fisik yang isu-isu tersebut sudah tidak asing lagi dikalangan para mahasiswa sejarah dan peneliti sejarah Indonesia. Padahal banyak sejarah di Indonesia yang sampai saat ini belum di telusuri secara komprehensif. Salah satu topik yang menarik adalah perkembangan sejarah kota di Indonesia yang sampai saat ini masih kurang dijadikan sebagai bahan atau objek kajian sejarah. Mengenai sejarah Kota di Indonesia banyak menyimpan informasi yang belum terungkap hingga sekarang. Dengan melakukan penelitian sejarah kota, kita tidak hanya memperkaya khasanah sejarah nasional secara umum, namun juga memperdalam pengetahuan kita tentang dinamika tata ruang kota di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dalam sejarahnya merupakan wilayah jajahan oleh orang-orang eropa. Negara-negara tersebut antara lain, Portugis, Inggris, Prancis, dan Belanda. Indonesia sebagai salah satu negara jajahan lebih mencolok pada masa Kolonial Belanda.

Berbicara mengenai pembentukan negara jajahan di Indonesia kurang lebih terjadi pada tahun 1800 di daerah Pulau Jawa oleh Belanda, dalam periode 1792-1830 merupakan masa di mana kerajaan Surakarta dan Jogjakarta

menghadapi banyak masalah, tetapi kedua kerajaan ini lebih merdeka dari tekanan orang-orang Eropa daripada kerajaan Jawa lainnya sejak akhir abad ke-17.

Dalam rangka perluasan kekuasaan Belanda di luar Jawa, salah satu wilayah yang menjadi sasaran adalah Indonesia bagian timur.<sup>1</sup> Di antara wilayah di timur yang mengalami masa kolonisasi oleh Belanda adalah Sulawesi bagian selatan. Pada abad ke-19 memang sebagai titik dimulainya pembentukan negara jajahan, tapi bagi Sulawesi bagian selatan pembentukan ini dimulai ketika Britania resmi mengambilalih kekuasaan di Makassar. Berdasarkan hal ini membuat pihak Belanda merasa terancam atas kekuatan yang dibangun oleh Britania sehingga Belanda melakukan berbagai langkah agar dapat mengambilalih kekuasaan tersebut. *Nieuwe Organisatie 1824* yang merupakan dokumen paling penting di abad ke-19 adalah refleksi dari hubungan yang tentu saja dipaksakan antara pemerintah kolonial dengan para penguasa lokal di Sulawesi bagian selatan. Dari dilaksanakannya dua kebijakan tersebut, maka dalam pandangan administratif penguasa kolonial, secara umum wilayah Sulawesi bagian selatan dibagi atas dua kategori, yakni wilayah yang dikuasai dan dikelola secara langsung oleh pemerintah kolonial dan wilayah yang tidak dikuasainya tetapi dikuasai oleh para penguasa lokal yang semua menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial dan mendapat kebebasannya meskipun dibatasi.

Sulawesi bagian selatan yang berada di wilayah Indonesia bagian timur adalah daerah yang merasakan pembentukan negara jajahan oleh pihak Belanda. Abad ke-19 memang sebagai titik dimulainya pembentukan negara jajahan, tapi

---

<sup>1</sup> Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. (Jakarta, Serambi, 2010: 259).



bagi Sulawesi bagian selatan pembentukan ini dimulai ketika Britania resmi mengambil alih kekuasaan di Makassar, berdasarkan hal ini membuat pihak Belanda merasa terancam atas kekuatan yang dibangun oleh Britania. Sehingga Belanda melakukan berbagai langkah agar dapat mengambil alih kekuasaan tersebut, *Nieuwe Organisatie 1824* dan Perjanjian Bungaya yang diperbaharui adalah dua dokumen yang paling penting di abad ke-19 yang merupakan refleksi dari hubungan yang tentu saja dipaksakan antara pemerintah kolonial dengan para penguasa lokal di Sulawesi bagian selatan. Dari dilaksanakannya dua kebijakan tersebut, maka dalam pandangan administratif penguasa kolonial, secara umum wilayah Sulawesi bagian selatan dibagi atas dua kategori yakni wilayah yang dikuasai dan dikelola secara langsung oleh pemerintah kolonial dan wilayah yang tidak dikuasainya tetapi dikuasai oleh para penguasa lokal yang semua menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial dan mendapat kebebasannya meskipun dibatasi.

Di tahun 1848 pengaturan administratif dilanjutkan di mana Pemerintahan Makassar diganti namanya dengan Pemerintahan Celebes dan Daerah-daerah Tergantung (*Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden*) yang secara eksplisit menunjukkan wilayah yang diklaimnya meski pada prakteknya tidak mengubah wilayah yang dikelolanya, termasuk Sulawesi bagian selatan di dalamnya. Dengan pengaturan ini, secara lebih rinci wilayah dibagi menjadi 3 kategori yakni; (1) wilayah pemerintah (*gouvernements landen*) yang diperintah langsung, (2) wilayah pemerintah yang tak diperintah langsung, dan (3) daerah-daerah sekutu (*bondgenootschappelijke landen*). Wilayah kategori pertama hanya

meliputi Distrik Makassar, Distrik-distrik Utara (Noorderdistricten), Bantaeng dan Bulukumba (istilah resminya *Bantaeng en Boelokoemba*), dan Pulau Selayar, sedang kategori kedua meliputi wilayah Kaili (Kajelie), Pare-Pare, Tanette, Tallo, Wajo, dan Laiwui. Sedang mereka yang masuk dikategori ketiga, dianggap sebagai “sekutu” dengan dasar penandatanganan para penguasa wilayah-wilayah ini atas Perjanjian Bungaya yang diperbaharui dan termasuk di dalamnya Mandar, Toraja, Masenrempulu (Massenre Boeloe), Luwu, Ajattappareng (Adja Tamparan), Bacukiki, Nepo, Labaso, Barru, Soppeng, Bone, Gowa, Sandrabone, Turatea, Buton, Pulau Sumbawa, dan Pulau Flores.<sup>2</sup>

Terkhusus pada daerah *Bonthain* atau Bantaeng yang berada pada wilayah kategori pertama, pada tahun 1905 daerah tersebut menjadi *Afdeeling* di bawah pemerintahan Belanda pada waktu itu. Di mana *Afdeeling Bantaeng* dipimpin oleh seorang asisten residen, setiap *Afdeeling* memiliki daerah yang disebut *Onderafdeeling* yang terdiri dari *onderafdeling Bantaeng*, *Onderafdeeling Bulukumba*, *Onderafdeeling Sinjai*, dan *Onderafdeeling Seleier* (Selayar) yang dipimpin oleh seorang *Controleur*. Berdasarkan pada pembentukan negara jajahan ini berbagai hal terjadi dalam masa tersebut. Jika kita melihat dari pendekatan sejarah kota khusus kota kolonial, Bantaeng termasuk salah satu dari sektor tersebut yang ditandai dengan adanya sebuah peta *afdeling Bantaeng* pada tahun 1922 yang menggambarkan adanya bangunan penjara (*gevangenis*), tentara barak, wisma, dan rumah sakit. Dilanjutkan pada tahun 1924 menunjukkan sebuah

---

<sup>2</sup> Dias Pradadimara. “Dibentuknya Negara kolonial Di Sulawesi Bagian Selatan Di Abad Ke-19”. Jurnal *Lensa Budaya*. Vol, 12 No. 2. (2017:62).

bangunan Kantor Asisten Residen. Hal ini yang memperlihatkan bentuk pemerintahan kolonial di Bantaeng sebagai daerah jajahannya.

Dalam perkembangannya Bantaeng merupakan salah satu wilayah yang memperlihatkan kemajuannya sampai saat. Hal ini dapat dilihat dari eksistensinya dalam pengolahan hasil buminya yang sudah sampai ke mancanegara. hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk menelusuri perkembangan Bantaeng dengan fokus kajian sejarah kota pada masa Kolonial Belanda, 1905-1942.

Pada abad ke- 20 aktifitas yang ada di desa diambilalih kota-kota di Indonesia yang berdampak pada peralihan aktifitas dari desa ke kota bersamaan dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Penggerak yang berperan penting adalah pemimpin desa, sedangkan di kota munculnya kelompok sosial seperti kaum pelajar dan kelas menengah sebagai penggerak dalam sejarah. Pada awal abad ke- 20 kota muncul sebagai suatu kategori dalam sejarah Indonesia yang ditandai dengan kondisi wilayah tersebut yang mengalami aktifitas-aktifitas yang penting bagi wilayah yang lain. Hal inilah yang menjadi tolak ukur bahwa sejarah kota tercipta dengan dijadikannya suatu wilayah sebagai pusat aktifitas yang mempengaruhi perkembangan kota-kota yang ada di Indonesia.<sup>3</sup>

Sebuah kota Indonesia yang ideal pada awal abad ke 20, dicirikan oleh kota yang memiliki kekhasan tersendiri yang menunjukkan perbedaannya dengan sejarah yang lain. Dari sektor sejarah kota tradisional yang memiliki ciri khas dengan adanya pembagian spasial yang jelas berdasarkan status sosialnya,

---

<sup>3</sup> Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah* Edisi Kedua. (Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 2003:62).

contohnya di Yogyakarta yang memiliki penataan pemukimannya, di mana dilihat dari semakin dekat dengan Kraton maka semakin tinggi kedudukan/derajatnya. Adapun dari sektor sejarah kota, pedagang asing yang mempengaruhi bangunan, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial-budaya tersendiri, seperti pedagang Cina yang memiliki andil besar terhadap pertumbuhan kota-kota di Indonesia. Dari perspektif sejarah kolonialisme ditandai dengan munculnya benteng dan barak, perkantoran, rumah-rumah, gedung *societeit*, rumah ibadah *vrijmetselarij* (organisasi/gerakan yang memperjuangkan persaudaraan dan kebebasan) yang menggambarkan bentuk pemerintahan kolonial terutama kolonial Belanda terhadap negara jajahannya.<sup>4</sup>

Dalam pemerintahannya, Kolonial Belanda menjadikan Bantaeng sebagai daerah pemerintahan langsung yang di dipimpin oleh seorang Asistent Resident. Pemerintahan ini berlangsung selama periode 1905-1942.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin menelusuri sejarah Perkembangan Bantaeng pada periode 1905-1942 dengan mengangkat sebuah topik penelitian berjudul: Perkembangan Bantaeng pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1905-1942”.

## **1. 2. Batasan Masalah**

Berbicara mengenai perkembangan Kota Kolonial Belanda, terlebih dahulu kita arus mengetahui bagaimana perkembangan kota, yang menyebabkan kota

---

<sup>4</sup> Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah* Edisi Kedua. (Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 2003: 63).

tersebut memiliki tata ruang dan infrastruktur kota yang berciri kolonial Belanda. Selain itu, pada penelitian ini akan berfokus pada tahun 1905-1942 yang merupakan masa pemerintahan Belanda di *Afdeling Bantaeng*.

### **1. 3. Rumusan Masalah**

Masalah penting yang akan diketengahkan dalam kajian ini adalah

3.1 Bagaimana perubahan morfologi Kota Kolonial Belanda?

3.2 Bagaimana tata ruang dan infrastruktur Kota Kolonial Belanda tahun 1905-1942?

### **1. 4. Tujuan Dan Mamfaat Penelitian**

#### 1. 4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut penelitian memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui tata ruang dan infrastuktur kota Bantaeng.
2. Mengetahui perubahan strutur ruang Kota Bantaeng setelah penetrasi dan invervensi Belanda dalam pembangunan kota.

#### 1. 4.2 Mamfaat penelitian

Adapun mamfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Memperkaya literatur mengenai sejarah Bantaeng tahun 1905-1942.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bacaan sejarah, sehingga bermaafaat menambah khazanah informasi kesejarahan. Tambahan pula, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian sejarah berikutnya.
3. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai sejarah kota.

### **1.5. Tinjauan pustaka**

Penelusuran pustaka dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tinjauan pustaka dapat berfungsi sebagai pendukung, penguat maupun pembenaran terhadap data yang ditemukan. Sejumlah teori yang dipaparkan juga bermanfaat sebagai alat pengurai untuk membedah setiap persoalan yang pada gilirannya dapat ditemukan solusinya. Penelitian ini mengambil beberapa rujukan yang memperkuat rancangan kajian.

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Kuntowijoyo berjudul *Metodologi Sejarah* (Edisi Kedua) bagian sejarah kota. Menjelaskan tentang perkembangan penulisan sejarah di Indonesia yang bukan hanya berfokus kepada bidang yang umum saja tapi dalam perkembangannya mengambil topik lain seperti dinamika kehidupan perkotaan.

M.C. Ricklefs menulis buku berjudul *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* bagian pembentukan negara-negara jajahan. Ia menjelaskan tentang sebuah kependudukan yang dilakukan oleh Belanda di daerah jajahan, baik di Jawa

maupun di luar Jawa.<sup>5</sup> Dalam pembentukan negara jajahannya Bantaeng yang merupakan salah satu wilayah yang berada di wilayah Indonesia Bagian Timur, yang dijadikan sebagai salah satu wilayah pemerintahannya selama pembentukan negara jajahan tersebut.

Dalam sebuah artikel yang di tulis Samidi yang berjudul *Surabaya sebagai Kota Kolonial Modern pada Akhir Abad ke-19: Industri, Transportasi, Permukiman, dan Kemajemukan Masyarakat*, menjelaskan tentang kemajuan Kota Surabaya pada awal abad ke-20 ditandai oleh perubahan di berbagai bidang. Perubahan ini menyebabkan munculnya simbol modernitas kota, seperti industri, transportasi, dan permukiman modern.<sup>6</sup> Perkembangan industri mampu mengubah mata pencaharian penduduk kota dari sektor pertanian ke pabrik dan kerajinan. Kegiatan ekonomi industri didukung oleh masuknya kendaraan modern yang berfungsi sebagai alat angkutan barang dan orang. Kesempatan kerja yang terbuka mendorong laju migrasi, sehingga populasi penduduk meningkat. Artikel tersebut menjelaskan unsur-unsur yang menunjukkan perubahan Surabaya menjadi kota modern. Penjelasan lain berhubungan dengan perubahan tatanan fisik kota dan komposisi penduduk. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui kemajuan Kota Surabaya ketika terjadi perubahan secara simultan yang disebabkan oleh perkembangan berbagai bidang. Dari sini bisa dilihat perkembangan sebuah wilayah melihat dari setiap aspek yang berada di wilayah tersebut, begitupun

---

<sup>5</sup> Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern* (2010: 239).

<sup>6</sup> Samidi. "Surabaya Sebagai Kota Kolonial Modern Pada Akhir Abad Ke- 19: Industri, Transportasi, Permukiman, Dan Kemajemukan Masyarakat". *Jurnal Mozaik Humaniora*. Vol,17 No.1. (2017:157-180).

Bantaeng sebagai wilayah mengalami sebuah perkembangan sehingga dalam penulis melihat dengan apa yang terjadi dalam penulisan ini.

Dias Paradimara menulis artikel “Dibentuknya Negara Kolonial di Sulawesi Bagian Selatan di Abad ke-19”. Dias menjelaskan tentang serangkaian peristiwa yang merupakan proses awal pembentukan negara kolonial di Sulawesi bagian selatan di abad ke-19 utamanya sesudah tahun 1824. Hal itu merupakan bagian dari proses sejarah penting di mana negara kolonial secara perlahan-lahan (dan penuh uji coba dan kegagalan) dibentuk dan pada saat yang sama dilawan oleh berbagai pihak baik kelompok penguasa ataupun bukan. Sebagai landasan utama pengaturan administratif dan pengendalian kolonial maka dua alat utama yang diletakkan di tahun 1824 adalah *Nieuwe Organisatie*. Sejak tahun 1850 serangkaian kejadian menciptakan kondisi semakin dipercepatnya pemetaan negara kolonial yakni pertumbuhan perdagangan melalui Makassar, perang penaklukan Bone, dan penataan sistem peradilan. Selain itu, dalam penelitian ini menyebutkan Bantaeng sebagai wilayah pemerintahan langsung Kolonial Belanda dalam sebuah surat yang mengatur administrasi wilayah yang dilakukan oleh pemerintahan Kolonial Belanda.

Dalam sebuah artikel Nur Laely yang berjudul “Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Di Onderafdeling Bantaeng 1905-1942”. Ia menjelaskan tentang (i) terjadi peralihan dari sistem pemerintahan tradisional di mana dasar-dasar pelaksanaan pemerintahan tradisional/kakaraengang berdasar pada adat-istiadat, dan hukum kerajaan. Selain itu, masuknya pemerintah kolonial Belanda maka “*Ada' Sampulo Ruwa*” resmi menjadi *Adatregentschapraad* sebagai lembaga



pengelola keuangan pada pemerintah lokal. (ii) sistem administrasi yang dikembangkan pemerintah kolonial justru sepenuhnya ditujukan untuk mendukung semakin berkembangnya pola paternalistik yang menjiwai sistem birokrasi pada era kerajaan yang bertumpu pada Undang-Undang desentralisasi tahun 1922. (iii) pengaruh sistem pemerintahan kolonial terhadap politik dan aktivitas perekonomian di *Onderafdeeling* Bantaeng mengakibatkan terjadinya proses transformasi struktural dari struktur politik dan ekonomi tradisional ke arah struktur politik dan ekonomi kolonial dan modern.<sup>7</sup>

Dalam sebuah Jurnal Ilham Daeng Makkelo yang berjudul “Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis”, menjelaskan tentang perkembangan kota sejak awal abad ke-20 ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan kompleksitas elemen dan permasalahan perkotaan yang muncul. Kota tidak sederhana pada waktu dulu lagi. Kompleksitas dalam berbagai bidang memerlukan metode dan pisau analisa yang bisa menelusuri dan mengungkapkan bagian-bagian atau strukturnya hingga pada yang terkecil, dan juga menampilkan makna dibalik apa yang mudah terlihat karenanya tuntutan nya bisa berupa menghadirkan relasi struktural yang kadang rumit.<sup>8</sup> Salah satu perhatian penulis di sini adalah persoalan perkotaan dan masyarakatnya yang semakin kompleks dengan masuk melalui konsep modernitas. Modern, modernisasi, modernism, dan juga modernitas adalah konsep sejarah yang menjadi

---

<sup>7</sup> [Eprints.unm.ac.id/11608/1/ARTIKEL%20TESIS.pdf](https://eprints.unm.ac.id/11608/1/ARTIKEL%20TESIS.pdf) . Diunduh pada tanggal 11 desember 2020 jam 13.06 WITA

<sup>8</sup> Ilham Daeng Makkelo, “Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis Dan Tematis”, *Jurnal Lensa Budaya*, Vol. 12, No. 2 (2017: 83).

alat baca dalam mengurai kompleksitas itu dalam rentang waktu yang ada. Makna modernitas ini merupakan usaha untuk menjelaskan lebih beragam atas kenyataan sejarah perkotaan di Indonesia. Dari jurnal ini menjadi acuan bentuk penelitian sejarah kota yang terjadi di Bantaeng, yang lebih berfokus bentuk penelitian sejarah kota Kolonial.

Selain dari tulisan di atas terdapat juga penelitian akademis yang pernah dilakukan oleh Satriawati yang berjudul *Pembangunan Kota Makassar Dalam Periode Negara Indonesia Timur 1946-1950*. Dalam karya tulis ilmiah ini menjelaskan tentang pembangunan Kota Makassar dari masa kolonial Belanda, masa Jepang, sampai pada masa Negara Indonesia Timur yang berakhir tahun 1950. Selain itu Satriawati menjelaskan tata ruang kota pada masa tersebut. Namun, dalam karya ini hanya berfokus kepada wilayah Makassar, dan periode yang ditelusuri pada masa Negara Indonesia Timur.

Tulisan ini fokus pada aspek tata ruang dan infrastruktur kota Bantaeng, dan untuk mengetahui perubahan stuktur ruang kota setelah penetrasi dan intervensi Belanda dalam pembangunan kota, 1905-1942.

## **1. 6. Metode Penulisan**

### **1. 6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian sejarah mencakup tiga aspek utama, yaitu: tematik, ruang spasial, dan batasan temporal. Tematik berkaitan dengan fokus persoalan yang dijelaskan dalam penelitian. Konteks tematik ditelusuri secara khusus di Kota Bantaeng dalam kurun waktu masuknya pemerintahan Belanda pada tahun

1905 sampai tahun 1942, suatu periode sejarah yang banyak menentukan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, tanpa mengabaikan arti penting periode lainnya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka pada penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah. Metode adalah teknik riset atau alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Menurut Garraghan, metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara sistematis, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis secara tertulis. Sedangkan menurut Gottschalk metode adalah suatu prosedur dalam menyusun detail-detail yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen otentik menjadi suatu kisah yang saling berhubungan.

#### 1. 6.2 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan empat tahapan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Heuristik, berupa pencarian sumber pada berbagai lembaga, kelompok atau individu seperti bahan-bahan pustaka perpustakaan, koleksi pribadi, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantaeng, website *delpher* yang antara lain tersedia sumber yang cukup penting tentang Bantaeng; "*Beknopte beschrijving van bantaeng en boeloecomba op zuid*

*Celebes*” yang ditulis W.M. Donselaar, dan kontar Kearsipan Kabupaten Bantaeng.

2. Verifikasi (seleksi) sumber, baik dalam aspek eksternal (bahan) maupun internalnya (isi dan informasi). Tidak semua bahan digunakan dalam merekonstruksi kejadian. Oleh karena itu perlu dilakukan seleksi pada setiap bahan. Upaya pertama dalam menyeleksi bahan adalah dengan kritik eksternal yang terkait dengan bahan sumber sejarah. Kritik ini bertujuan untuk mengetahui posisi sumber sejarah, bahan dan waktu pembuatannya. Tahap kedua penulis melakukan seleksi secara internal. Kritik internal membutuhkan kecermatan dan daya kritis dalam memahami pesan atau informasi yang terkandung dalam sumber. Dalam kritik eksternal melihat dari bahan baik itu dalam bentuk arsip, jurnal, dan buku yang di dapatkan yang berbicara tentang Bantaeng. Dalam kritik internalnya penulis mencari informasi dan data dalam bahan tersebut yang berfokus pada masa Kolonial Belanda di Bantaeng.
3. Interpretasi dan analisa. Setelah diseleksi maka diadakan sintesis atas informasi dari sumber penelitian, berdasarkan subyek kajian. Upaya ini lebih memudahkan dalam melakukan interpretasi (penafsiran) atas realitas sosial. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah fakta. Yang dimaksud dengan fakta adalah suatu pernyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empirik

tentang suatu gejala yang ditanggapi dengan penggunaan suatu kerangka pemikiran tertentu.

4. Historiografi. Fakta yang telah dikumpulkan mengenai pembangunan kota Bantaeng tahun 1905-1942 diurutkan berdasarkan aspek waktu (kronologi).

### **1. 7. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran secara singkat mengenai penulisan karya ilmiah ini, penulis menyampaikan garis-garis besarnya yang terdiri dari beberapa bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub yang disusun menurut urutan pembahasannya.

Bab pertama sebagai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, alasan memilih judul, batasan rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka serta sistematika penulisan.

Bab kedua dipaparkan mengenai gambaran umum kota Bantaeng. Bab ini terbagi dalam tiga bagian yang terdiri dari awal munculnya kota Bantaeng, Bantaeng dibawah kekuasaan VOC, dan Bantaeng dibawah kekuasaan Hindia Belanda.

Bab tiga membahas tentang masa kolonial Belanda di Bantaeng yang terdiri sejarah terbentuknya pola ruang kota dan perkembangan Kota Bantaeng.

Bab empat membahas tata ruang dan infrastruktur Kota Kolonial Belanda tahun 1906-1942, yang terdiri dari sejarah bangunan-bangunan bekas kolonial Belanda di Kabupaten Bantaeng.

Setelah penjabaran dari bab satu sampai bab empat, maka dari situlah bisa ditarik kesimpulan oleh penulis. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang telah diajukan sekaligus penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan.

## BAB II GAMBARAN UMUM KOTA BANTAENG

### 2.1. Awal Munculnya Bantaeng

Dalam atlas sejarah karya Dr. Muhammad Yamin, telah dinyatakan bahwa wilayah Bantaeng sudah ada ketika kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Raja Kertanegara memperluas wilayahnya ke daerah Timur Nusantara untuk menjalin hubungan niaga pada tahun 1254-1292. Penentuan otentik peta Singosari ini jelas membuktikan Bantaeng sudah ada dan eksis pada waktu itu. Bahkan menurut Prof. Nurudin Syahadat, Bantaeng sudah ada sejak tahun 500 masehi sehingga dijuluki *Butta Toa*. Adapun dari laporan peneliti Amerika Serikat Wayne A. Bougas menyatakan Bantayan adalah kerajaan Makassar awal Tahun 1200-1600, dibuktikan dengan ditemukannya keramik yang berasal dari Dinasti Sung (960-1279) Dinasti Yuan (1279-1368).<sup>9</sup>

Berbicara tentang sejarah Bantaeng tidak lepas dari pembentukan kerajaan pada masyarakat Bugis dan Makassar. Dalam berbagai sumber kepustakaan khususnya pada *Rappang ri Bantaeng* menjelaskan bahwa peletak dasar bagi kehidupan di Bantaeng dikenal dengan sebutan *To Manurung ri Onto* sebagai raja Bantaeng pertama. Sebagaimana dalam sejarah di beberapa daerah Bugis dan Makassar akan mengacu pada konsep *To Manurung*. Karaeng Imran Masualle salah satu generasi dari kerajaan Bantaeng menggambarkan bahwa Bantaeng dulunya berupa lautan. Hanya beberapa tempat tertentu saja yang daratan yaitu daerah Onto, Sinoa, Bisampole, Gantarang Keke, Mamapang,

---

<sup>9</sup> Bougas, *Batayan: An Early Makassarese Kingdom 1200-1600 AD*. (Amerika Serikat, Archipel, 1998: 830).

Katapang dan Lawi-Lawi. Setiap wilayah memiliki *kare'*. Di Onto para *kare'* berjumlah tujuh *kare'*. Komunitas inipun membuat sebuah kesepakatan untuk mengangkat satu orang yang akan memimpin mereka. Namun sebelum itu para *kare'* akan melakukan sebuah ritual untuk meminta petunjuk dari yang maha kuasa. Lokasi ritual yang dilakukan oleh ketujuh *kare'* tersebut bertempat di Onto yang dikenal sekarang dengan simbol *Balla Tujua*. Dari ritual yang dilakukan akan mendapatkan petunjuk untuk mencari seseorang di salah satu tempat permandian yang berada di daerah Onto. Dari pencarian mereka mendapatkan seorang laki-laki yang sedang mandi, dan dia diminta oleh para *kare'* untuk menjadi pemimpin mereka, maka laki-laki tersebut dikenal sebagai *To Munurunga ri Onto*. Sebelum itu dalam cerita rakyat para *kare'* melakukan sebuah tradisi yang sekarang kita kenal dengan *angngaru*. Sebagai bentuk kesetiaan mereka siap untuk dipimpin oleh *To Munurunga*. Mereka pun membangun sebuah kehidupan kekaraengan di masyarakat Bantaeng. Perlu diketahui bahwa kerajaan pada saat itu merupakan sekutu kerajaan Gowa, sebelum diambilalih oleh kolonial Belanda akibat dari kekalahan kerajaan Gowa dalam perang Makassar.<sup>10</sup>

## **2.2. Bantaeng pada masa kekuasaan VOC dan Hindia Belanda**

Bantaeng pasca perang Makassar (1666-1667) yang di akhir dengan perjanjian bungaya dan pernyataan pendek, bantaeng di tempatka sebagai kerajaan yang dikuasai langsung oleh VOC. Penguasaan langsung Bantaeng oleh

---

<sup>10</sup> Suriada Mappagara, Dkk, 2017, *Sejarah Bantaeng*, (Bantaeng, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, 2017: 100).



VOC dalam pelaksanaannya berada dibawah kekuasaan dan pengawasan kerajaan Bone sebagai sekutu terkuat VOC dalam menaklukkan Kerajaan Gowa. Kerajaan Gowa sendiri ditempatkan sebagai kerajaan sekutu, sedangkan daerah-daerah yang dinyatakan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Gowa sebelum Perang Makassar dinyatakan berada di bawah kekuasaan VOC sebagai daerah kekuasaan langsung. Walaupun demikian pada kenyataannya daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan langsung itu tetap berada dibawah kekuasaan penguasa-penguasa lokal. Hal ini di karenakan pengaruh langsung VOC hanya terwujudkan di wilayah Makassar yang merupakan bandar niaga. Semua ini tidak lepas dari tujuan untuk utama datang VOC ke Sulawesi, yaitu untuk menguasai kegiatan pelayaran perdagangan maritim pada waktu itu.

Daerah-darah yang dinyatakan sebagai daerah kekuasaan langsung hanya sekedar mendapatkan pengakuan dari VOC. Namun dalam keterlibatan VOC dalam pelaksanaan kekuasaan tidak pernah terlaksana di daerah-daerah yang dinyatakan sebagai daerah kekuasaannya berdasarkan perjanjian.<sup>11</sup> Campur tangan mereka hanya dalam hal pergantian raja-raja atau penguasa. Dalam pelaksanaan kekuasaan dan pemerintahan tidak pernah terlaksana, hubungan kekuasaan hanya terjadi antara penguasa setempat dan pejabat VOC yang berada di Makassar. Pelaksanaan kekuasaan dan pemerintahan pada kenyataannya tetap berada dibawah penguasa setempat dan dilakukan sesuai dengan kebiasaan setempat. Struktur politik setempat tidak pernah tersentuh perubahan dengan

---

<sup>11</sup> Edward L. Poelingomang, *Perubahan Politik Dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1905-1942*, (Yogyakarta, Ombak, 2004: 37).

kehadiran VOC yang berdasarkan perjanjian, telah dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan di daerah yang berada di bawah kekuasaan langsung. Masa kekuasaan VOC berlangsung lama, yaitu berawal ketika dicapainya perjanjian bungaya (1669) hingga akhir abad XVII (desember 1799), yang dibuktikan oleh perjanjian dan pernyataan pendek.

Pengaturan wilayah Sulawesi Selatan pada masa kekuasaan VOC maupun pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, selalu mengalami perubahan. Namun perubahan itu selalu mengikuti dan atas pertimbangan kepentingan Belanda. Khusus pada masa kekuasaan VOC wilayah Sulawesi Selatan, Belanda memfokuskan pada penanganan pemerintahan kerajaan Gowa yang dianggap berbahaya dan mengancam kedudukan Belanda. Untuk menangani kerajaan ini, maka kekuasaannya dibagi-bagi dalam beberapa wilayah serta beberapa distrik yang ada didalamnya. Salah satu wilayah yang dimaksud adalah *Oostder Provincie* (wilayah bagian timur). Namun kebijakan ini adalah kebijakan yang terwariskan dan diwariskan oleh pemerintahan Inggris dan pertahanan untuk sementara waktu oleh Pemerintahan Hindia Belanda sebelum ada sistem baru.<sup>12</sup>

Wilayah timur yang dimaksud meliputi 14 distrik, yaitu: Tompobulu, Bulukumba, Gantarang, Ujung Loe, Palioi, Bontotanga, Garassi, Hero, Langelange, Tiro, Ara, Tanah Beru, Lemo-Lemo dan Bira. Seluruh distrik ini dikepalai oleh seorang Assistant Resident yang berkedudukan di Bantaeng, sedangkan setiap distrik tetap dikepalai oleh Bangsawan setempat dengan gelar

---

<sup>12</sup> Suriada Mappagara, Dkk, *Sejarah Bantaeng*, ( 2017: 238-239).

lokalnya seperti karaeng, arung, atau lomo.<sup>13</sup> Wilayah timur berpotensi, tanahnya subur, perahu layar pinisi banyak diproduksi. Letaknya berada pada garis tenggara jazirah selatan pulau Sulawesi, atau dengan kata lain berada pada garis singgung laut Flores disebelah selatann dan teluk Bone di sebelah timur. Wilayah ini juga merupakan daerah transisi antara pengaruh kekuasaan Kerajaan Gowa dan pengaruh kekuasaan Kerajaan Bone.<sup>14</sup>

Bantaeng dan bulukumba di bagian selatan di Celebes dideskripsikan dalam sebuah laporan penelitian W.M. Donselaar. Menjelaskan daerah Bantaeng dan Bulukumba yang merupakan wilayah Celebes yang terletak di ujung selatan pulau tersebut. yang memiliki panjang 21, 5 km yang ditembuh selama 20 jam. Sementara lebarnya berkisar 18,85 km memiliki perbedaan jarak tembuh selama 5 sampai 10 jam. Dalam sebuah laporan tentang celebes menyatakan bahwa jumlah penduduk Bantaeng dan bulukumba mencapai 25.000 jiwa, meskipun demikian jumlah penduduk tidak bisa dilaporkan secara tepat, seperti jumlah penduduk kedua daerah tersebut yang terlalu sedikit dan membuat kita bisa meragukan laporan ini, setidaknya untuk jumlah penduduk yang bisa kita predeksi untuk kedua daerah ini adalah 50.000 jiwa. Kedua daerah tersebut merupakan daerah sekutu Kerajaan Makassar yang memiliki pengaruh sangat kuat, tetapi kemudian diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda yang pada waktu VOC sebagai senjatanya. Sehingga dalam Pemerintahan Hindia Belanda

---

<sup>13</sup> Edward L. Poelingomang, Dkk, *Sejarah Sulawesi Selatan* Jlid I, (Makassar, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Berkerjasama Dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Makassar, 2004: 185).

<sup>14</sup> Edward L. Poelingomang, Dkk, *Sejarah Sulawesi Selatan*, (2004:186).

tersebut mengangkat sebuah pejabat yang memegang kekuasaan yang bergelar *gezaghebber* dan tinggal di Bantaeng.

Bantaeng di sebelah utara berbatasan dengan daerah Kerajaan Gowa, dan sebelah timur dengan Bulukumba, di selatan dibatasi oleh laut dan di barat oleh sungai yang memisahkan dari Turatea. Panjangnya kira-kira 6 jam dan lebarnya 7 jam perjalanan. Bantaeng merupakan wilayah pengunungan dan sebagian besar didominasi oleh gunung Lombo Battang merupakan gunung tertinggi di Sulawesi Selatan, menurut perhitungan Tuan Menvill Van Carnbee hampir 10.000 kaki tingginya. Disepanjang pantai terbentang sebuah dataran lebar yang digunakan bagi pertanian padi. Gunung dan lingkungan sekitarnya adalah sumber air yang mengalir kesungai dan anak sungai, yang menyuburkan daratan-daratan di daerah tersebut. sungai-sungai di Bonthian yaitu Tino, Kayeli, sungai Tanga-Tanga, sungai Lette, Pasorong, Lumpangan, biangkeke, Nipa-Nipa, Turunganasu, Kaloli, uweloi, dan Kalimasang, yang mengalirkan airnya ke pantai selatan. Setiap sungai ini tidak dapat dilayari, tetapi dimuaranya ketika air tinggi dapat dilayati dengan perahu ke pedalaman.<sup>15</sup>

Bantaeng dan Bulukumba merupakan daerah yang memiliki tanah yang subur dan termasuk daerah yang terindah di Sulawesi selatan. Baik di lereng gunung maupun di sepanjang pantai banyak padi yang di tanam. Lahan pertanian padi ini dialiri oleh saluran air berbeda di distrik selatan dan timur yang tergantung pada musim hujan. Di daerah lebih tinggi di pengunungan

---

<sup>15</sup> W.M. Donselaar, *Beknapte Beschrijving Van Bonthain En Boeloecomba Zuid Celebes*, (Bki Jilid III, 1855: 1 )

menghasilkan kopi terbaik di Sulawesi. Selain itu di dekat ibukota, dalam jumlah besar tumbuh kentang, kol, buncis, selada dan sayuran lain. Kentang dijual di pasaran Bantaeng seharga f 3-4 perpikulnya dan sebagian besar di ekspor ke Makassar. Selain itu masih banyak lagi yang bisa di produksi didaerah Bantaeng seperti jagung, panda atau tanaman nanas yang tumbuh liar dimana-mana, berbagai jenis ubi, tebu, semangka, kelapa, manga, jeruk, pisang. Durian, nangka dan hutan yang banyak menampung bamboo dan rotan. Jenis-jenis kayu pun dihasilkan yang sangat baik dan langka seperti kayu Bilalang, Kanana dan Campaga.<sup>16</sup>

Letak geografis dan potensi wilayah *Oostder Provincie*, khususnya Bantaeng dan Bulukumba sudah sejak dulu selalu diincar oleh Bone. Setelah perjanjian Bungaya 1667, Arung Palakka, raja Bone XIV (1672-1692), sebagaisekutu terkuat VOC dalam menaklukkan kerajaan Gowa melalui perang Makassar (1666-1669), memperoleh Bantaeng, Bulukumba, Lamuru, Pacciro, Mario, dan sebagian Soppeng, sebagai daerah-daerah pinjaman. Namun demikian hak pinjam terhadap daerah-daerah itu dicabut oleh VOC, karena Arung Palakka tidak membantu VOC untuk menyerang dan menghancurkan secara utuh kerajaan Gowa. Arung Palakka lebih memilih menaklukkan Mandar, Cenrana, Binuang, Batuluppa dan Sawitto.<sup>17</sup>

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak VOC di setiap wilayah jajahannya mereka tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang terjadi di negeri

---

<sup>16</sup> W.M. Donselaar, *Beknapte Beschrijving Van Bonthain* (1855: 2).

<sup>17</sup> Suriada Mappagara, Dkk, 2017, *Sejarah Bantaeng*, (2017: 182).

Belanda pada khususnya dan Eropa pada umumnya. Namun dalam perjalannya kekuasaan VOC di tanah jajahan sering kali mengambil keputusan yang melampaui batas. Sehingga banyak kebijakan yang di buat VOC yang berdampak buruk terhadap pihak Belanda itu sendiri. Salah satunya dampak yang di timbulkan keberhasilan Inggris menguasai negeri-negeri jajahan Belanda, terkhususnya daerah Bantaeng yang pernah juga di bawah kekuasaan Inggris.

Bantaeng sebagai pusat pemerintahan *Oostder Provincie* (bagian Timur) meliputi beberapa distrik yang masuk dalam wilayah ini. Distrik-distrik ini selalu menjadi medan pergolakan politik antara pihak raja-raja lokal dengan pihak kolonial. Kenyataan ini mengindikasikan betapa pentingnya Bantaeng dimata mereka. Sudah menjadi pandangan dan pemikiran umum bahwa motivasi pihak kolonial menguasai suatu wilayah karena wilayah tersebut bermamfaat atas kelangsungan pemerintahan dan monopoli perdagangan. Bantaeng pada abad XVII sebagai kerajaan yang dianggap paling aman dan damai serta terhindar dari konflik-konflik antar pihak kolonial dengan masyarakat lokal. Dalam bidang politik pemerintahan sepanjang sejarahnya, Bantaeng tidak pernah melakukan permusuhan dengan kerajaan-kerajaan lainnya, namun yang ada adalah kerajaan lain yang menjadikan Bantaeng sebagai wilayah yang diperebutkan.

Sebelum inggris berkuasa di Indonesia pada tahun 1811-1816, Indonesia sebagai negara jajahan Belanda juga harus berada dibawa kekuasaan Perancis. Oleh karena Belanda di bawa kekuasaan Perancis, maka Indonesia sebagai negara jajahan Belanda juga harus berada di bawah kendali Perancis yang menunjuk Herman W. Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Ketika

Belanda diduduki pada tahun 1806 dibentuk panitia umum yang terdiri dari C.Th. Elout Dan C.H. Van Grasveld untuk menangani wilayah jajahan yang disebut *Bataafsche-Indie Republiek* (Republik Batavia-Indie), dan kemudian mengangkat Herman W. Daendels sebagai Gubernur Jenderal untuk wilayah republik yang baru itu pada tahun 1808 dan menerima wilayah itu dari Gubernur Albertus H. Wiese pada 14 Januari 1808. Perluasan kekuasaan Perancis ini mempengaruhi Inggris untuk bergerak cepat dalam persaingannya menduduki wilayah jajahan Belanda. Sehingga pada tahun 1806 Tanjung Harapan berhasil direbut oleh Inggris, kemudian menyusul Maluku pada tahun 1810. Setelah itu armada Inggris dibawah pimpinan Lord Minto memblokir dan menyerang Batavia, sehingga Gubernur Jenderal Willem Janssens (1811) yang menggantikan Daendels mengungsi ke Semarang. Serangan yang terus dilancarkan Inggris menyebabkan Janssens terpaksa menandatangani kapitulasi di Semarang pada 18 September 1811. Kapitulasi itu menunjukkan penyerahan tanpa syarat semua wilayah jajahan. Pemerintah Inggris selanjutnya mengangkat *Thomas Stamford Raffles* (1811-1816) sebagai Letnan Gubernur untuk wilayah bekas jajahan Belanda.<sup>18</sup>

Pada awal kekuasaan Inggris di Sulawesi Selatan, Richard Philips selaku Resident Makassar (1812-1814) belum dapat berbuat banyak terhadap sikap dan tindakan-tindakan kerajaan lokal yang ada di wilayah ini. Kebijakan yang ditempuh Inggris untuk menjadikan wilayah Sulawesi Selatan masuk dalam kebijakan secara umum Inggris di Indonesia yang mengandalkan “pajak tanah”

---

<sup>18</sup> Edward L. Poelingomang, Dkk, *Sejarah Sulawesi Selatan*, (2004: 171).

tidak sepenuhnya berhasil. Untuk menerapkan kebijakan itu, terlebih dahulu wilayah-wilayah yang dimaksud harus dikuasai secara politik dan pemerintahan, tetapi Bantaeng sendiri sebagai pusat pemerintahan *Oostder Provincie* yang sangat dibutuhkan oleh Inggris tidak mampu dikuasai karena secara politik di Sulawesi Selatan, wilayah *Oostder Provincie* pasca perang Makassar adalah wilayah kekuasaan dan pengawasan Bone atas kebijakan VOC. Status ini diambil karena Bone membantu VOC menaklukkan Kerajaan Gowa dalam perang Makassar. Kekuasaan dan pengawasan Bone terhadap wilayah *Oostder Provincie* pernah diambil alih oleh VOC tetapi mampu direbut kembali oleh Bone pada tahun 1797.

Kerajaan Bone yang menguasai Maros, Bantaeng, Bulukumba dan beberapa daerah di sebelah selatan Makassar menjadi pekerjaan besar Inggris untuk menguasai Sulawesi Selatan pada umumnya. Untuk membantu Richard Philips menegakkan wibawa kekuasaan Inggris di daerah ini, maka pada tanggal 2 juni 1814 bantuan pasukan dibawah pimpinan mayor jenderal Nightingale tiba di Makassar. Untuk menjalankan tugasnya mengamankan Sulawesi Selatan dari pergolakan politik, maka mayor jenderal nightingale diberikan kekuasaan penuh mengurus masalah politik dan militer ini. Agar terjalin hubungan kordinasi yang baik dengan semua personil, Resident Makassar, Richard Philips, memberitahukan kepada semua perwira di daerah ini mengenai tugas khusus yang diembang oleh Mayor Nightingale.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Edward L. Poelingomang, Dkk, *Sejarah Sulawesi Selatan*, (2004:186).



Tindakan pertama yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Nightingale setiba di Makassar, mengenai kedudukan Bone terhadap wilayah Oostder Provincie, adalah mengirim utusan ke Ujung Loe, dan berusaha sedapat mungkin merebut Bantaeng dan Bulukumba yang telah lama di kuasai oleh Bone. Ujung Loe menjadi pilihan pertama, karena daerah ini telah lama menjadi wilayah kekuasaan perampok dan pencuri. Karaeng Loe selaku penguasa setempat tidak berusaha membasmi para perambok dan pencuri, bahkan membangun kerjasama dengan tujuan agar perampok dan pencuri menjadikan pangkalan keamanan, karena daerah itu dianggapnya belum dapat dijangkau oleh alat-alat kekuasaan yang bermusuhan dengan Bone.<sup>20</sup>

Setelah Inggris berhasil merebut Bantaeng dan Bulukumba pada pertengahan juni 1814, raja-raja setempat mulai bersilang pendapat mengenai kehadiran Inggris di daerah ini. Karaeng gantarang dan karaeng Ujung Loe segera menyatakan setia kepada Bone tetapi dalam perkembangannya karaeng ini tidak bisa berbuat banyak, sementara karaeng Bulukumba senantiasa mengadakan hubungan komunikasi dengan bangsawan-bangsawan Bone yang berkedudukan di Kajang. Raja Bone Toappatunru Arung Palakka (1812-1823), yang mengetahui bahwa Karaeng Ujung Loe dan Karaeng Gantarang telah berpihak kepada Inggris, segera memerintahkan pasukannya agar membangun Benteng pertahanan di Beba, sedapat mungkin mempertahankan daerah itu. Beba yang terletak tidak jauh di sebelah barat benteng dipilih oleh Toppatunru

---

<sup>20</sup> Edward L. Poelingomang, Dkk, *Sejarah Sulawesi Selatan*, (2004:187).

Arung palakka sebagai pusat pertahanan untuk wilayah *Oostder Provincie*, karena daerah itu juga menjadi basis pemberontakan gerakan karaeng Data. Sehingga ada kemudian membangun kerjasama dengannya, juga dimaksudkan untuk menahan gerak maju pasukan inggris dan sekutu-sekutunya yang yang melakukan perjalanan lewat darat dari Makassar.<sup>21</sup>

Memperhatikan kuatnya pasuka Bone dan sekutu-sekutunya, demikian juga luasnya pengaruh kekuasaan kerajaan Bone di Sulawesi Selatan, tampaknya kurang mampu diimbangi oleh alat-alat persenjataan yang dimiliki oleh pemerinah Inggris di Makassar. Memahami kelemahannya ini, Inggris mencoba mendekati Arung Ponre, salah seorang raja lokal yang bersahabat dengan Bone. Tujuan utama pemerintahan Inggris mengajak Arung Ponre untuk bersekutu dengannya adalah mencoba menciptakan disintegrasi diantara kerajaan-kerajaan yang bersekutu dengan Bone. Namun, hasil yang diterima oleh Inggris adalah menolakan dari Arung Ponre atas surat Assistant Resident *Oostder Provincie*, Owen Philips untuk menjalin sebuah hubungan bersahabatan. Bentuk penolakan Arung Ponre dengan menyatakan perang terhadap Bantaeng yang kuasai oleh Ipada tanggal 25 juni 1814 yang mendapat bantuan dari Bone.<sup>22</sup>

Perang antara Arung Ponre beserta sekutunya dengan Bantaeng beserta sekutunya tidak berlangsung lama. Pada akhir bulan juni 1814, pasukan Inggris yang dikenal dengan sebutan Sepoy yang dikirim ke Bantaeng oleh Mayor Jenderal Nightingale terpaksa ditarik kembali ke Makassar. Kegagalan ini

---

<sup>21</sup> Edward L. Poelinggomang, Dkk, *Sejarah Sulawesi Selatan*, (2004:187).

<sup>22</sup> Edward L. Poelinggomang, Dkk, *Sejarah Sulawesi Selatan*, (2004:188).

disebabkan oleh Gowa yang tidak sepenuhnya membantu, sementara raja-raja bawahan Gowa dipedalaman tetap setia kepada Bone. sehubungan dengan ketidakmampuan Inggris membantu dan mempertahankan Bantaeng dari serangan musuh, menyebabkan *Resident* Makassar, Richard Philips, memerintahkan kepada *Assistant Resident Oostder Provincie*, Owen Philips beserta komandan pasukan, Letnan Kolonel Macloed, untuk segera mempelajari Faktor-faktor pendukung yang menjadi kekuatan Bone dan sekutu-sekutunya. Selain itu Richard Philips memerintahkan untuk menentukan daerah strategis yang dapat dijadikan sebagai pangkalan pertahanan Inggris. Namun dalam menjalankan perintah tersebut ada sebuah kendala yang dihadapi oleh pihak Inggris dan kurangnya subsidi persenjataan yang tidak mengimbangi kekuasaan Bone dan sekutunya.<sup>23</sup>

Semua perlawanan yang ditunjukkan oleh Bone di wilayah *Oostder Provincie* membuat Inggris tidak leluasa untuk menata sumber-sumber ekonomi di daerah tersebut. Pajak pertanian yang dilancarkan oleh pihak Inggris di wilayah tersebut dilakukan pada tanggal 25 juni 1814 resident Makassar, Richard Philips memerintahkan kepada Assitent Resident Owen Philips untuk mempertahankan daerah sumber pajak vertienen dalam produksi pertanian. Namun usaha untuk mempertahankan yang di rencanakan oleh Inggris gagal total

---

<sup>23</sup> Edward L. Poelingomang, Dkk, *Sejarah Sulawesi Selatan*, (2004:188).

dengan muncul perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal di wilayah *Oostder Provincie*.<sup>24</sup>

Pihak Inggris yang mengalami kesulitan dalam mengimbangi perlawanan Bone dengan sekutu-sektunya, beberapa kali dihadapkan pertempuran yang berujung semakin sempitnya wilayah pertahanan mereka. Pada pertengahan agustus 1814 pasukan Bugis dan Makassar mengundurkan diri ke kerajaan masing-masing, begitupun dari pihak Inggris pun meninggalkan wilayah *Oostder Provincie* menuju Makassar. Dari semua perlawanan yang di hadapi Inggris dan hambatan-hambatan yang datang membuat Inggris pada tanggal 25 September 1816 menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah Hindia Belanda.<sup>25</sup>

Pada waktu Pemerintah Hindia Belanda kembali ke Sulawesi Selatan untuk mengambil alih kekuasaan, Belanda diperhadapkan dengan sikap beberapa kerajaan yang menolak kehadirannya, terutama Kerajaan Bone begitupun kerajaan lain seperti kerajaan Gowa, Suppa, Agangnionjo, Bantaeng dan Konfederasi Bangkala, Binamu dan Laikang (konfederasi Turatea). Walaupun demikian Pemerintah Hindia Belanda menguasai kembali wilayah tersebut, bukan hanya kekuatan persenjataan semata tetapi juga taktik yang digunakan untuk memikat beberapa daerah agar turut memperkuat pasukannya dalam menghadapi lawan-lawannya. Taktik ini yang berakibat dan mengharuskan Pemerintah Hindia Belanda memulihkan kedudukan dari beberapa daerah sebagai kerajaan pinjaman menjadi daerah yang berdiri sendiri dan kerajaan yang

---

<sup>24</sup> Edward L. Poelingomang, Dkk, *Sejarah Sulawesi Selatan*, (2004:189).

<sup>25</sup> Edward L. Poelingomang, Dkk, *Sejarah Sulawesi Selatan*, (2004:194).

berkedudukan sebagai kerajaan sekutu dari Pemerintah Hindia Belanda, seperti Konfederasi Bangkala, Binamu dan Laikang.<sup>26</sup>

*Afdeeling* Bantaeng sepanjang abad XIX tidak bisa berjalan sebagaimana fungsinya sebelum ada perundang-undangan yang mengatur secara tegas, karena wilayah ini masuk dalam bagian wilayah Makassar dan daerah bawahannya. Maka untuk menata pemerintahan di daerah-daerah yang dinyatakan berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda, pada tahun 1824 pengaturan wilayah dilakukan yang tertulis dalam lembaran negara (*staatblad*). Pemerintah Makassar dan daerah bawahan (*Gouvernement Makassar en onderhoorighden*) dibagi dalam lima wilayah administrasi pemerintahan, yaitu: (a) Makassar, meliputi kota pelabuhan Makassar, Fort Rotterdam (Benteng Makassar), kota Vlaardingen dan kampung-kampung di sekitarnya serta pelabuhan-pelabuhan yang terletak di depan kota pelabuhan Makassar ; (b) distrik-distrik di bagian selatan (*zuiden districten*), meliputi distrik Aing Towa, Bontolebang, Galesong, Polombangkeng, Sawakong, Mamuju, Balo, Lengese, Takalara, Topejawa, Lakotang; (c) Distrik-distrik bagian utara (*Noorder Districten*), meliputi distrik Maros, Bontoa, Riraya, Sodiang, Malawa, Camba, Balocci, Laiya, Labuaya, Bungoro, Pangkajene, Bungo, Labakkang, Marang, Kalukua, Sigeri Dan Katena; (d) Bulukumba dan Bantaeng, meliputi distrik Bantaeng dan Tompobulu, Gantarang, Tala, Palewooi, Tanah Beru, Bontotanga, Lemo-lemo, Ujung Loe, Weiro, Langelange, Tiro dan Bira; (e) Selayar, meliputi distrik Bonto Bangun, Tanete,

---

<sup>26</sup> Edward L. Poelingomang, *Sejarah Sulawesi Selatan*, (2004: 40).

Batang Mata, Bukiet, Mare-mare, Bonea, Opa-opa, Gantarang, Bulu-bulu, Laiyolo, Bonto Baros, Barang-barang, Bangon dan Onto.<sup>27</sup>

Bantaeng sebagai salah satu pusat pemerintahan distrik dari lima distrik pemerintahan Makassar dan daerah Bawahannya mengacu kepada sistem pemerintahan lokal yang berlaku khusus di wilayah pemerintahan ini. Demikian juga pemerintahan distrik lainnya, menjalankan pemerintahan berdasarkan sistem daerah (kerajaannya) masing-masing. Cuma di daerah pusat distrik ini ditempatkan pejabat Pemerintah Hindia Belanda dari kalangan mereka yang bertindak sebagai penanggungjawab di pusat pemerintahan distrik yang dikenal *Assisten Residen*. Pelaksanaan pemerintahan di serangkan kepada seorang Gubernur yang memimpin pemerintahan Makassar daerah Bawahannya. Gubernur membawahi lima orang residen yang masing-masing ditempatkan pada setiap wilayah administrasi pemerintahan.

Berdasarkan aturan setiap Asisten Residen masih membawahi beberapa kontrolir (*Controleur*) yang ditempatkan pada setiap distrik untuk melaksanakan pengawasan kekuasaan dan kegiatan-kegiatan penguasa-penguasa setempat dan bangsawan-bangsawannya. Walaupun demikian, kenyataannya hanya ada seorang residen yang bertindak juga sebagai pengawas setiap distrik yang dibantu oleh seorang juru bicara.

Setelah tahun 1860, Pemerintahan Hindia Belanda baru melangkah untuk melaksanakan pengawasan kekuasaan di daerah distrik-distrik oleh para *Controleur*. Pengaturan wilayah administrasi pemerintah diperbaharui setelah

---

<sup>27</sup> Edward L. Poelingomang, *Sejarah Sulawesi Selatan*, (2004: 40).

dilakukan pemetaan sebelum pemberlakuan sistem pengawasan tersebut pada tahun 1857 sehubungan dengan *regeringsreglement* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1855. Pemerintahan Makassar dan Bawahannya ditata tidak menurut atauran yang seragam akan tetapi menatanya beragam, serta menempatkan pejabat pemerintah tidak merata. Bagian pemerintahan Makassar, misalnya, dibagi dalam dua cabang pemerintahan (*Onderafdeeling*), yaitu cabang pemerintahan Makassar dan Tallo. Cabang pemerintahan Makassar yang berada langsung dibawah pengawasan Asisten Residen (*Assistant Resident*) yang dibantu oleh seorang pejabat hukum (*Magistraat*) dalam melaksanakan pemerintahan di bagian pemerintahan Makassar. Di cabang pemerintahan Tallo ditempatkan seorang Kontrolleur yang berkedudukan di Parangloe.<sup>28</sup>

Pengaturan wilayah dibagian pemerintahan distrik-distrik bagian utara (*Afdeeling Noorder Disticten*) memiliki bentuk yang lain. Bagian pemerintahan ini dibagi dalam tiga distrik pajak (*pachdistric*) yaitu: Maros, pangkajene dan Sigeri serta distrik-distrik pegunungan (*bergregent-schappen*). Pada masing-masing wilayah administrasi pemerintahan ini ditempatkan seorang kontroler, kecuali daerah Maros yang berada dibawah penguasa asisten residen bagian pemerintahan Maros. Di wilayah pemerintahan distrik-distrik bagian selatan (*Afdeeling Ziuder Districten*) hanya ditempat seorang kontroler yang dibantu oleh seorang kolektir (*Collekteur*) dan seorang juru bicara. Wilayah ini dibagi

---

<sup>28</sup> Suriadi Mappagara, *Sejarah Bantaeng*, (2017: 206).

dalam empat distrik yaitu distrik: Topejawa, Bontolebang, Galesong dan Polombangkeng.

Sementara distrik-distrik yang masuk dalam wilayah Afdeeling Bantaeng tidak mengalami perubahan yang cukup berarti dan bahkan dianggap tidak mengalami perubahan. Setiap pembaharuan sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda seringkali terjadi intrik-intrik antara penguasa pribumi dengan Pemerintah Hindia Belanda, untuk mempertahankan wilayah kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda seringkali melakukan penyerangan dengan dalil keamanan dan ketentraman kampung. Hal ini bisa di pahami karena wilayah yang serang adalah wilayah yang selalu melakukan protes dan perlawanan atas kekuasaan Belanda.<sup>29</sup>

Masa Pemerintahan Hindia Belanda di Bantaeng maupun kebanyakan kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan pada abad XIX hanya merupakan pengawasan kekuasaan penguasa bumiputra dalam kegiatan pergantian penguasa dan hubungan kekuasaan antara penguasa-penguasa bumiputra. Pengawasan kekuasaan ini dilakukan terhadap semua kekuasaan bumiputra di daerah itu. Walaupun dalam prakteknya terjadi diskriminasi pemberlakuan secara kaku ketat dan pemberlakuan secara lunak, baik terhadap daerah-daerah pemerintahan (*Gouvernement Landen*) yaitu daerah-daerah yang dinyatakan berada dibawah kekuasaan langsung, maupun terhadap kerajaan pinjaman (*leevorstrendom*) yaitu Tallo, Tanete, Wajo dan kemudian Bone beserta kerajaan-kerajaan sekutu, yaitu

---

<sup>29</sup> Suriadi Mappagara, *Sejarah Bantaeng*, (2017: 207).



kerajaan Gowa, Laikang, Mandar, Tanah Toraja, Masserengpulu, Ajatapparang, dan Soppeng. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan dan ketentuan bagi penataan dan pelaksanaan pemerintahan, akan tetapi pada kenyataannya “kebijaksanaan” yang memainkan peranan utama; tidak ada keteraturan dan kepastian yang dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan pemerintahan dan kekuasaan walaupun hanya terhadap daerah-daerah pemerintahan yang dikuasai secara langsung.<sup>30</sup>

### **2.3. Morfologi Kota Bantaeng Dari Awal Munculnya, Kekuasaan VOC Sampai Kembalinya Pemerintah Hindia Belanda.**

#### **2.3.1 morfologi kota kolonial Belanda di Indonesia.**

Morfologi perkotaan berkaitan dengan pengetahuan tentang logika bentuk, dalam hal ini bentuk Kota. Pendekatan ini berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu dan melibatkan pada karakter fisik, struktur, relasi dan transportasi suatu Obyek dan elemen pembentuknya.<sup>31</sup>

Hubungan antara sejarah Kota dan artefak fisik kota bersifat bolak-balik, penelusuran sejarah kota akan menuntun kita pada pemahaman proses yang membentuk sebuah kota, sebaliknya melalui artefak elemen-elemen kota, kita dapat menelusuri sejarah kota. Pemahaman kita tentang “morfologi perkotaan” tidak dapat dilepaskan dari wujud fisik kota yang terbentuk utama oleh kondisi fisik lingkungan maupun interaksi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis.

---

<sup>30</sup> Edward L. Poelingomang, *Sejarah Sulawesi Selatan*, (2004: 44).

<sup>31</sup> Pinzon, *Mapping Urban Form. Morphology Studies In The Contemporary Urban Landscape*. (Netherlands, Ph.D. De Technische Universiteit Delft. 2009: 57).

Morfologi perkotaan mempelajari perkembangan bentuk fisik di kawasan perkotaan, yang tidak hanya terkait dengan arsitektur bangunan, namun juga sistem sirkulasi, ruang terbuka, serta prasarana perkotaan (khususnya jalan sebagai pembentuk struktur ruang yang utama). Dari interaksi komponen-komponen penting pembentuknya yang saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Arsitektur fisik dari kota dan arsitekturnya merupakan refleksi dari jaman yang terdiri dari aspek sosio-politik-budaya dari masyarakatnya yang berkembang seiring waktu. Terkait dengan waktu, menurut Widodo(2004) jaringan perkotaan dari sebuah kota dapat dianalogikan sebagai tumpukan dari jaringan yang terdiri dari lapisan yang berbeda dari periode waktu yang berbeda-beda. Kaitan antara konteks sejarah suatu kota dengan tipomorfologi antara lain dapat diteliti dalam hal bagaimana dan kapan variasi tipologi suatu bentuk muncul, apakah tipologi spesifik selalu mengindikasikan fungsi yang sama, atau apakah bentuk yang sama tetapi fungsinya berubah seiring waktu.<sup>32</sup>

Pemahaman konsep kota periode pra kolonial dapat mengacu kepada peran Sultan atau raja yang sangat dominan dalam merencanakan bentuk kota di Jawa maupun di luar Jawa. Wilayah-wilayah di luar tembok kota (Kraton) digambarkan merupakan hunian yang berkumpul atas dasar asal atau keahlian. Santoso (2006) menggambarkan Banten pada abad 16 sebagai wilayah dengan otonom tersebut dibedakan berdasarkan asal atau kelompok etnis, dan mereka

---

<sup>32</sup> Rony Gunawan Sunaryo, Dkk, *Pengaruh Kolonialisme Pada Morfologi Ruang Kota Jawa Periode 1600-1942*, (Yogyakarta, UGM, 2014: 326).

bebas mengatur bentuk dan struktur huniannya, akan tetapi penguasa wilayah harus tunduk dan berkoordinasi dengan Sultan Banten. Gambaran yang terjadi di Jawa menjadi gambar seperti apa yang dilakukan di Sulawesi Selatan terkhusus Bantaeng ketika berbentuk kerajaan, dimana mereka menata wilayah kerajaan berdasarkan asal dan etnis, tetapi tetap berkoordinasi dengan raja atau penguasa lokal.

Pengaruh kolonial Eropa pada perencanaan kota di Jawa berlangsung pada periode yang panjang selama 3 abad. Proses tersebut diawali dengan didirikannya pos-pos dagang Belanda di awal 1600 berupa kompleks hunian para pedagang Belanda dengan bangunan-bangunan fungsional. seiring waktu pos dagang tersebut berkembang menjadi benteng pertahanan, hingga meluas dan menjadi kota benteng. Pola administrasi ekonomi dan kekuasaan merupakan penentu dari struktur kota di Jawa pada saat itu. Hingga akhir abad 18 pola administrasi ekonomi dan kekuasaan di kota-kota Jawa bersifat parsial dan berlaku setempat. Awal abad 19 dapat dikatakan merupakan awal dari penerapan prinsip kolonial dalam perencanaan kota di Jawa. Kebijakan Daendles dalam sistem administrasi pemerintahan dan kebijakan untuk membangun jalan raya pos memperlihatkan visinya untuk menyatukan Jawa ke dalam satu sistem administrasi. Kondisi ini terlaksana berkat rintisan VOC dalam penetrasi kekuasaan di Jawa sejak didirikannya pos dagang pertama mereka di Batavia

awal abad 17 hingga akhir abad 19, bisa dikatakan hampir seluruh wilayah Jawa telah mengakui kedaulatan kolonial Belanda.<sup>33</sup>

Hal serupa dilakukan di luar Jawa dalam memperluas kekuasaannya, Sulawesi Selatan adalah wilayah sangat berpotensi sehingga menjadi sasaran dalam perkembangan kota kolonial. Namun dalam perluasan wilayah yang dilakukan oleh Belanda tidak semudah yang mereka dapatkan di Jawa, kekuatan perlawanan yang di tunjukkan oleh Kerajaan Gowa dan sekutunya membuat Belanda beberapa kali harus menurunkan niatnya untuk berlabuh di Sulawesi Selatan dan kembali ke Batavia. Namun perlawanan itu akhirnya harus dikalahkan akibat konflik internal yang terjadi di wilayah Indonesia timur sehingga pada tahun 1665-1666 menjadi titik di mana pihak Belanda berhasil mengalahkan kerajaan Gowa. Akibat keberhasilan yang di capai oleh Belanda membuat mereka mampu menguasai perdagangan dan pelayaran di Indonesia bagian timur. Perkembangan kota kolonial yang dilakukan di Jawa Hampir sama dilakukan di Sulawesi Selatan dengan membangun pos-pos dagang di wilayah tersebut yang perpusat di Makassar lalu berkembang menjadi benteng pertahanan yang berpusat di benteng Rotterdam. Namun, tidak semua wilayah yang ada dalam Sulawesi Selatan mendapatkan pengaruh langsung oleh VOC pada waktu itu, ini dikarenakan kurangnya perhatian terhadap wilayah-wilayah lain dan berfokus ke pusat saja yaitu di Makassar. Selain itu sekutu mereka yang mendapatkan beberapa wilayah yaitu kerajaan Bone, menyebabkan dalam

---

<sup>33</sup> Rony Gunawan Sunaryo, Dkk, *Pengaruh Kolonialisme Pada Morfologi*, (2014: 327).

penataan wilayah tidak berjalan dengan baik. Sehingga dalam kurun waktu kekuasaan VOC di Sulawesi Selatan hanya Makassar saja yang mengalami perkembangan kota kolonial dikarenakan Makassar di jadikan sebagai pusat perdagangan yang sesuai dengan tujuan awal VOC datang ke Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk di wilayah lain (terkhusus Bantaeng) berada dalam kekuasaan VOC sebagai lumbung penghasil pertanian dalam meningkatkan perekonomian, namun tidak terdapat perkembangan wilayah yang signifikan seperti yang terjadi di Makassar.

Dalam perkembangan kota kolonial di bagi dalam beberapa periode yaitu: periode 1600-1700 sebagai masa dimana dalam pembentukan struktur kota tidak dapat dikatakan sebagai satu kesatuan homogen, kota merupakan kumpulan permukiman berbasis etnis yang dapat dikatakan otonom satu sama lain. Faktor yang menyebabkan konsentrasi permukiman ini adalah kepentingan perdagangan, sehingga dapat dikatakan pasar, pelabuhan dan dermaga merupakan elemen pengikat kota pada periode ini. Elemen utama kolonial dilihat dari adanya bangunan Loji, gudang, dan benteng. Periode 1700-1800 merupakan masa peralihan dari kota pelabuhan menjadi kota benteng, yang dikarenakan konsentrasi yang cukup besar sehingga kloni pos dagang berkembang menjadi kota dengan benteng yang mengeliling. Faktor peralihan ini adalah semakin meluasnya pengaruh Kolonial Belanda pada tanah jajahan, maka untuk mempertahankan itu dengan membangun benteng-benteng pertahanan yang bisa melindungi dari serang-serang para musuh yang ingin merebut atau

memberontak atas kekuasaan kolonial Belanda. Pada periode ini terdapat tiga karakter kota yang spesifik secara bentuk dan strukturnya yaitu kota benteng awal, kota benteng lanjut, dan kota kodmologi kerajaan, kota perbentengan yang menjadi elemen utama pada periode ini. Periode 1800-1900 merupakan abad perubahan dalam perkembangan kota kolonial Belanda di Indonesia. Pusat administrasi yang semula berpusat dibenteng kota digantikan dengan elemen kantor dan rumah administrator kota. Pejabat administrasi kolonial terdiri dari *Resident, Asisstant Resident, Controleur, Asisstant Controleur*, sementara pejabat administrasi lokal terdiri dari bupati , wedana, camat, lurah. Periode 1900-1942 merupakan masa Pemerintahan Hindia Belanda memutuskan untuk mendesentralisasi administrasi untuk menghadapi perubahan sosial ekonomi dan demografi yang terjadi pada waktu itu, selain itu juga menyesuaikan skalah permasalahan di tingkat lokal. Penataan peraturan desentralisasi pada tahun 1903 dan disusul pembentukan dewan peraturan daerah pada tahun 1905 memberikan kerangka hukum yang diperlukan, maka untuk menunjang keputusan tersebut stasiun, kantor dagang swasta, rumah/kantor menjadi elemen utama kolonial Belanda.<sup>34</sup>

Kolonial Belanda dalam membangun pengaruhnya di negara-negara jajahannya dilakukan dengan pola perkembangan kota yang sama disetiap wilayah baik di Jawa maupun di luar Jawa tepatnya di Sulawesi Selatan, yang membedakan adalah Jawa Merupakan pusat pemerintahannya selama melakukan

---

<sup>34</sup> Rony Gunawan Sunaryo, Dkk, *Pengaruh Kolonialisme Pada Morfologi*, (2014: 328-334).

pendudukan di Indonesia tepatnya di Batavia, sedangkan Sulawesi Selatan adalah wilayah sangat berpotensi dan sangat menguntungkan bagi VOC karena merupakan jalur terpenting dalam perdagangan dan pelayaran yang mampu meningkatkan perekonomian VOC.

Periode-periode ini menjelaskan bagaimana perkembangan morfologi kota kolonial Belanda di Indonesia, yang mengalami perubahan secara horizontal. Dari periode pertama masuknya kolonial Belanda dalam perkembangan morfologinya yang berfokus di pelabuhan yang berfokus pada kegiatan perdagangan yang berubah atau berkembang menjadi benteng-benteng pada periode selanjutnya. Kolonial Belanda dalam perkembangan kotanya di Indonesia tidak berhenti di periode itu saja. Setelah menjadikan wilayah jajahannya sebagai wilayah benteng sebagai pusat aktifitas, dalam perkembangan selanjutnya Kolonial Belanda mengembangkan pemerintahan sehingga pusat pemerintahan atau kekuasaan dialihkan dari benteng menjadi perkantoran sebagai pusat administrasi.

### **2.3.2. Definisi Bantaeng Sebagai Kota.**

Bantaeng merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang mengalami perkembangan pesat. Dalam mendefinisikan Bantaeng sebagai kota secara administrasi adalah hal yang keliru, hal ini dikarenakan sampai saat ini Bantaeng Cuman berstatus sebagai daerah kabupaten. Namun dalam pendefinisian Bantaeng sebagai Kota, melihat dari morfologi atau

perkembangan daerah tersebut. Namun sebelum itu dalam menentukan wilayah sebagai Kota, ada beberapa hal yang menjadi landasan yang digunakan. Pertama, kriterium mengenai jumlah penduduk di suatu wilayah. Landasan ini menjadi acuan dalam menentukan suatu wilayah sebagai kota, dalam menentukan jumlah penduduknya. Di setiap negara memiliki batasan tersendiri untuk menentukan jumlah penduduk yang dinyatakan sebagai wilayah perkotaan, begitupun di Indonesia. Bantaeng merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih sekitar 178.699 jiwa untuk sekarang, pada awal abad ke 20 jumlah penduduk Bantaeng dalam data administrasi Kolonial menyatakan berada pada kisaran 25.000 jiwa, namun pendekatan ini tidak menampakkan sebuah ciri khas dari wilayah yang dianggap sebagai kota. Kedua, kota menurut hukum, pendekatan ini menitik beratkan pada sistem hukum yang dibangun dalam suatu wilayah, daerah yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dapat dikatakan sebagai wilayah perkotaan. Dalam pemerintahan sulawesi selatan, Bantaeng merupakan wilayah yang berada dalam administrasi pemerintahannya, yang berstatus sebagai wilayah kabupaten. Dalam masa pemerintahan Kolonial Belanda dalam sebuah lembaran surat pembagian wilayah yang berada pada kategori pertama hanya meliputi Distrik Makassar, Distrik-distrik Utara (Noorderdistricten), Bantaeng dan Bulukumba (istilah resminya *Bantaeng en Boelokoemba*), dan Pulau Selayar. Namun, tetap tidak dapat menggambarkan secara langsung ciri khas dari sebuah kota. Ciri khas kota dapat dilihat dari segi ekonomi wilayah tersebut, dimana melihat dari fungsi-fungsi kota yang khas adalah dengan adanya aktifitas-aktifitas budaya, industri, perdagangan dan



niaga, serta kegiatan pemerintahan. Melihat dari ciri khas ini, Bantaeng merupakan salah satu wilayah yang memiliki ciri khas tersebut. Dengan perkembangan yang diperlihatkan oleh Bantaeng dalam mengembangkan hasil buminya, baik itu beras, kopi, dan kopra yang sudah sampai mancanegara. Dalam sejarahnya Bantaeng menjadi salah satu wilayah yang sangat menguntungkan bagi Kolonial Belanda selama pemerintahannya, hal ini tidak lepas dari bentuk dan letak wilayahnya yang subur dan strategis sebagai pelabuhan. Selain itu, segi sosial juga menjadi ciri khas, hal ini dilihat dari hubungan-hubungan sosial yang terbangun dalam wilayah tersebut. Hubungan-hubungan kehidupan sosial kota yang terjadi biasanya digambarkan dengan hubungan yang impersonal, hubungan sepintas lalu, adanya kelompok tertentu, bersifat sering berulang, dan lain-lain. Perkembangan kota terjadi akibat adanya revolusi industri, adapun dalam perkembangannya terkadang banyak orang menggunakan kualifikasi-kualifikasi yang intuitif yang berdasarkan dari anggapan uniknya suatu kebudayaan atau periode sejarah tertentu. Sebagai mana yang diketahui tentang Bantaeng merupakan wilayah secara hukum administrasi bukan sebuah kota, tapi dalam perkembangan sejarahnya Bantaeng adalah wilayah dijadikan pemerintahan langsung Kolonial Belanda.

Bantaeng sebagai salah satu wilayah pemerintahan langsung Kolonial Belanda, menjadi wilayah yang mendapatkan dampak dari perkembangan yang dilakukan oleh Kolonial Belanda. berstatus wilayah *Afdeeling*, Bantaeng dikuasai oleh Kolonial Belanda dibawah kekuasaan *Assistent Resident*. Namun pengaruh

Kolonial Belanda dalam perkembangannya Bantaeng lebih mencolok pada masa pemerintahan di tahun 1905-1942.